

PERAN MEDIA MASSA DALAM PEMBERITAAN: KASUS KORUPSI DI KALIMANTAN SELATAN

Seftian Pratama Heru Arnafama¹, Muhammad Adam Lazuardi², Putri³, Ira Lesmia Putri⁴, Muzahid akbar hayat⁵

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: seftian.pratama91@gmail.com¹, m.adam@gmail.com²,

hello.putri2002@gmail.com³, iralesmiap49@gmail.com⁴, m.akbarhayat@gmail.com⁵

Abstrak

Korupsi adalah masalah sistemik yang menghambat pembangunan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media massa dalam pemberitaan kasus korupsi di Kalimantan Selatan serta dampaknya terhadap kesadaran publik dan kebijakan publik. Dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) terhadap pemberitaan media lokal dan nasional serta wawancara dengan jurnalis dan pakar komunikasi, penelitian ini mengkaji bagaimana media massa mengangkat isu korupsi, tantangan yang dihadapi dalam peliputan, serta dampaknya terhadap penegakan hukum dan persepsi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media massa berperan penting dalam menyoroti kasus korupsi dan mendorong transparansi, berbagai faktor seperti tekanan politik, keterbatasan investigasi jurnalistik, dan ketergantungan pada sumber informasi yang terbatas menjadi tantangan besar. Pemberitaan yang dilakukan secara konsisten telah berperan dalam membentuk opini publik, namun perlu penguatan dalam investigasi dan keberlanjutan pemberitaan untuk menghasilkan perubahan signifikan.

Kata kunci: Media massa, korupsi, pemberitaan, Kalimantan Selatan, opini publik, penegakan hukum

Abstract

Corruption is a systemic issue that hampers development in Indonesia, including in South Kalimantan. This research aims to analyze the role of mass media in reporting corruption cases in South Kalimantan and its impact on public awareness and public policy. Using content analysis methods on both local and national media reports and interviews with journalists and communication experts, this study examines how the media raises corruption issues, the challenges faced in reporting, and the impact on law enforcement and public perception. The findings show that while mass media plays a crucial role in highlighting corruption cases and promoting transparency, factors such as political pressure, limited journalistic investigations, and reliance on restricted sources of information present significant challenges. Consistent reporting has played a role in shaping public opinion, but strengthening investigative efforts and the continuity of coverage is needed to create meaningful change.

Keywords: Mass media, corruption, reporting, South Kalimantan, public opinion, law enforcement

Pendahuluan

Media massa merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kegiatan manusia dalam mencari sebuah berita. Berita adalah informasi terbaru yang dapat datang dari arah mana saja (Ibrahim, 2007). Informasi melalui media massa sudah menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan manusia modern, sehingga juga memiliki peran strategis dalam

memberikan informasi secara serempak kepada publik, baik melalui media cetak atau juga media elektronik. Informasi yang ditampilkan oleh media, pasti memiliki tujuan, baik itu tujuan komersial, ideologi, ataupun politik.

Di Indonesia dalam tujuan politik, media massa sangat akrab dengan pemberitaan kasus korupsi. Peran media massa dalam pemberitaan kasus korupsi merupakan suatu strategi dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk meminimalisir angka kejahatan dan mencapai ketertiban dalam masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan sendiri dapat berjalan dengan baik ketika kedua upaya di dalamnya, yaitu penal dan nonpenal dapat berjalan secara integral (Putra, 2016).

Upaya penal merupakan upaya melalui penegakan hukum pidana, sedangkan upaya non-penal sifatnya lebih ke arah kebijakan sosial, sehingga bisa berbentuk apa saja. Namun satu hal yang menarik, adalah bagaimana media massa juga dapat menjalankan peranan non-penal dalam penanggulangan kejahatan.

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan di Indonesia, dan Kalimantan Selatan tidak terkecuali. Menurut McCombs dan Shaw (1972), media massa memiliki peran penting dalam menentukan agenda publik (agenda-setting) dengan menyajikan isu-isu penting, termasuk korupsi. Munculnya kasus kasus korupsi di Indonesia memiliki dampak yang sangat serius terhadap masyarakat. Korupsi adalah masalah global yang meresap dengan efek merugikan pada kinerja ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi masyarakat (Sovianti, 2019).

Dalam konteks Kalimantan Selatan, media massa lokal dan nasional memainkan peran yang berbeda dalam peliputan kasus-kasus korupsi. Media massa, sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki peran strategis dalam menyoroti kasus korupsi, membentuk opini publik, serta mendorong adanya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel (Al Mustaqim et al., 2024; Tarigan, 2024; Triwidodo et al., 2024).

Pemberitaan kasus-kasus korupsi melalui media massa sering kali menjadi sorotan utama, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik korupsi yang terjadi (Hikmawati, 2018; Malau, 2023; Wardhana & Muhammad, 2023). Hal ini juga berlaku di wilayah Kalimantan Selatan, yang meskipun tidak sepopuler Jakarta atau kota besar lainnya, namun memiliki sejumlah kasus korupsi yang mencuat ke permukaan. Terakhir yang menjadi sorotan adalah kasus OTT korupsi proyek pembangunan di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang melibatkan 7 tersangka dan salah satu yang terlibat yaitu Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sendiri. Dengan munculnya kasus tersebut membuat media massa membuat pemberitaan secara meluas dan menambah catatan hitam dari tindak korupsi yang juga pernah terjadi di Kalimantan Selatan sebelumnya.

Dengan gencarnya penindakan oleh KPK, apalagi disertai pemberitaan media yang menyorot pelaku korupsi, seyogyanya diikuti dengan surutnya tindak pidana korupsi (Latala et al., 2021; Wibisono et al., 2021). keberhasilan media massa dalam memberitakan kasus-kasus korupsi di Kalimantan Selatan tidak lepas dari tantangan. Faktor seperti pembatasan akses informasi, intervensi politik, dan terbatasnya profesionalisme jurnalis sering kali menjadi hambatan dalam penyajian berita yang objektif dan mendalam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran media massa dalam memberitakan kasus korupsi di Kalimantan Selatan, baik dari sisi kualitas pemberitaan, strategi yang digunakan oleh media, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media massa memiliki peran signifikan dalam pemberitaan kasus korupsi di Indonesia. Misalnya, Nadhiroh et al.

(2024)menganalisis pesan-pesan anti-korupsi dalam berita Republika.co.id untuk meningkatkan peran media Islam dalam pemberantasan korupsi. Penelitian-penelitian ini menyoroti bagaimana media massa dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kasus korupsi melalui pendekatan pemberitaan mereka.

Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana media massa di Kalimantan Selatan berperan dalam pemberitaan kasus korupsi, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemberitaan, serta sejauh mana pemberitaan tersebut dapat meningkatkan kesadaran publik dan mempengaruhi proses penegakan hukum di daerah tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi bagi penguatan peran media massa dalam pemberantasan korupsi di Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi. Menurut Sugiyono (2023), analisis isi adalah metode yang efektif dalam menganalisis bagaimana isu-isu korupsi dikemas dan disampaikan oleh media. Analisis isi dilakukan terhadap pemberitaan kasus korupsi di beberapa media massa lokal seperti Kanal Kalimantan, Warta Banjar, Radar Banjarmasin, dan Pojok Banua serta media nasional seperti Kompas dan Antara News dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

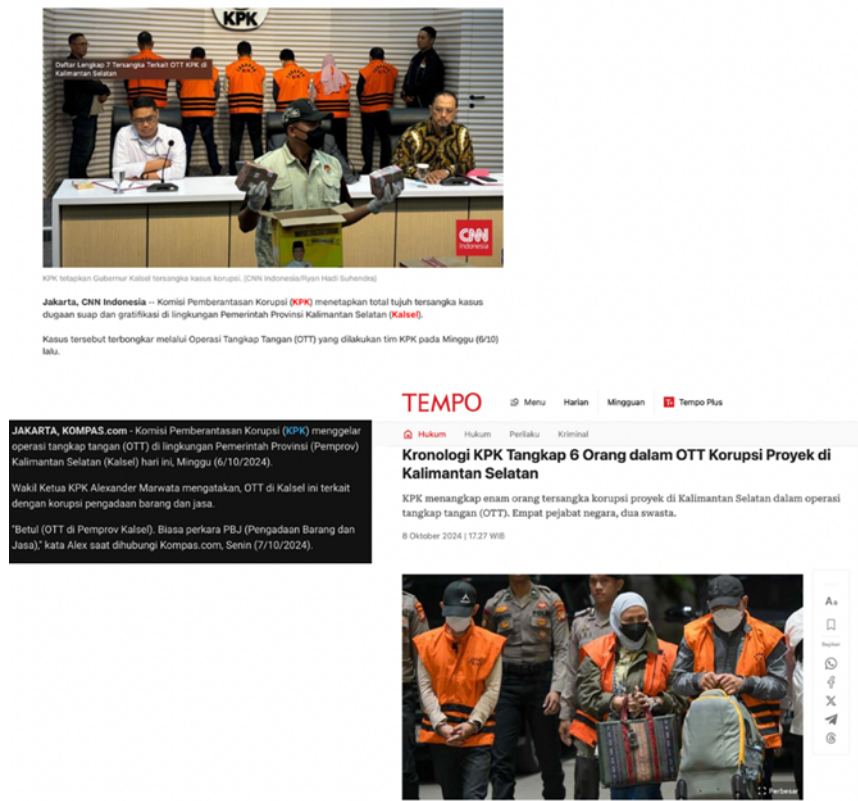
Hasil dan Pembahasan

Peran Media Massa dalam Menentukan Isu Publik

Media massa di Kalimantan Selatan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan isu-isu yang menjadi perhatian publik. Media dapat memilih dan menonjolkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah ini, yang kemudian membuat kasus tersebut menjadi lebih terlihat dan dianggap penting oleh masyarakat. Media, dengan cara ini, berperan dalam membentuk prioritas publik. Sebagai alat penyebaran informasi yang memiliki akses luas dan pengaruh besar, media massa tidak hanya memberitakan kejadian, tetapi juga berfungsi untuk membentuk agenda publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dalam konteks korupsi, media massa di Kalimantan Selatan memainkan peran kunci dalam mengangkat kasus-kasus korupsi, memprioritaskan topik tertentu, dan membingkai bagaimana isu tersebut harus dipahami oleh publik. Peran media ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui beberapa perspektif.

Dengan intensitas pemberitaan yang tinggi, media dapat menjadikan korupsi sebagai isu utama yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pengambil kebijakan. Di Kalimantan Selatan, media seringkali meliput kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, anggota DPRD, atau kepala daerah. Contoh kasus terbarunya adalah OTT kasus pengadaan proyek di ruang lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan pada 6 Oktober 2024 lalu yang melibatkan beberapa Institusi terkait dan juga Gubernur Kalimantan Selatan. Pemberitaan yang terus-menerus dan mendalam membuat masyarakat semakin sadar bahwa korupsi adalah masalah serius yang harus segera ditangani.

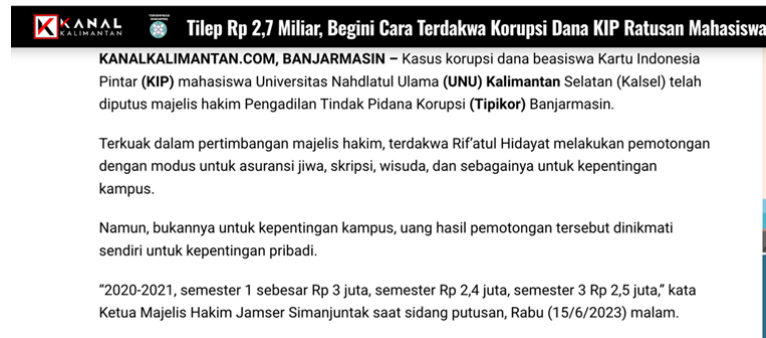
Seftian Pratama Heru Arnafama, Muhammad Adam Lazuardi, Putri, Ira Lesmia Putri, Muzahid akbar hayat



Gambar 1. Beberapa media yang memberitakan OTT kasus pengadaan proyek di Kalimantan Selatan

Pemberitaan yang dibuat oleh hampir semua media lokal maupun nasional membuat isu tersebut menjadi meluas dan menjadi perhatian publik. Berita yang melibatkan pejabat tinggi atau tokoh-tokoh penting, secara otomatis akan menjadi agenda utama dalam diskursus politik dan sosial di Kalimantan Selatan. Media massa mengangkat tema pemberantasan korupsi sebagai masalah yang mendesak dan penting untuk diperhatikan oleh publik dan pihak berwenang.

Melalui pemberitaan yang konsisten, media dapat meningkatkan kesadaran publik tentang dampak buruk korupsi terhadap perekonomian daerah, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Media dapat melaporkan bagaimana praktik korupsi menghambat pembangunan infrastruktur, merugikan rakyat miskin, dan mengurangi dana untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini membuat korupsi tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga isu sosial-ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian khusus.



Gambar 2. Media Kanal Kalimantan mengenai kasus korupsi dana beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Media juga mempengaruhi sejauh mana korupsi menjadi diskursus dalam masyarakat. Melalui diskusi publik yang dimediasi oleh media, masyarakat di Kalimantan Selatan dapat berdialog mengenai penyebab korupsi, cara pemberantasan yang efektif, serta peran mereka sebagai warga negara dalam melawan korupsi. Media massa juga terbantu dengan banyaknya platform media sosial yang menjadi wadah diskusi dan dialog masyarakat. Juga sebagai wadah untuk masyarakat melakukan pengawasan dan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Framing dan Narasi dalam Pemberitaan

Dalam menganalisis framing pemberitaan, ditemukan bahwa sebagian besar media menggunakan narasi yang menekankan pada kerugian negara dan dampak sosial-ekonomi dari kasus korupsi. Hal ini sesuai dengan penelitian Entman (1993), yang menunjukkan bahwa framing dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Namun, terdapat variasi dalam cara media membingkai pemberitaan, di mana media nasional lebih banyak berfokus pada dampak politik dan sistemik, sementara media lokal cenderung menyoroti aspek-aspek personal atau lokal dari kasus-kasus korupsi tersebut.

Melalui framing, media tidak hanya memberitakan peristiwa korupsi, tetapi juga menentukan bagaimana peristiwa tersebut dipahami oleh publik. Framing ini berhubungan dengan cara media memilih untuk menyoroti aspek-aspek tertentu dari sebuah kasus, serta narasi yang dibangun dalam pemberitaan (Scheufele, 2022).

Beberapa media yang memberitakan kasus korupsi di Kalimantan Selatan cenderung membingkai kasus korupsi sebagai kejahatan besar yang merugikan negara dan masyarakat. Dalam framing ini, korupsi digambarkan sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan sebagai tindakan yang merusak pembangunan daerah. Media mengarahkan perhatian publik pada dampak sosial dan ekonomi dari tindakan korupsi, seperti penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

PELAIHARI, KOMPAS.com- Dua mantan Kepala Desa (**Kades**) di Kabupaten **Tanah Laut**, Kalimantan Selatan (Kalsel) berinisial R dan HAM ditangkap tim Kejaksaan Negeri Tanah Laut setelah diduga **korupsi dana desa**.

R merupakan mantan Kades Muara Kintap yang menjabat dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Dari hasil audit, R terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 883.542.774.

Sementara HAM adalah mantan Kades Damit Hulu yang menjabat mulai 2005 sampai dengan tahun 2021. HAM terbukti korupsi dana desa sebesar Rp 872.982.444.

Baca juga: Aipda HR Pernah Curhat via Facebook soal Aroma Dugaan Korupsi di Internal Polres Luwu

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Teguh Imanto mengatakan, dalam waktu dekat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melimpahkan kasus korupsi dana desa ke Pengadilan Tindak Pidana **Korupsi** (Tipikor) di Banjarmasin.

"Saat ini JPU tengah mempersiapkan berkas yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Banjarmasin," ujar Iman Teguh Imanto dalam keterangan persnya yang diterima, Selasa (18/10/2022).

Gambar 3. Media Kompas.com mengenai kasus korupsi dana desa di Kabupaten Tanah Laut

Selain itu, media juga seringkali menyoroti bagaimana korupsi terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Dalam framing ini, media menyoroti ketidakwajaran pejabat yang menggunakan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, serta merusak integritas institusi pemerintah. Kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau anggota legislatif di Kalimantan Selatan sering diberitakan dengan penekanan pada aspek ini, yang memberi kesan bahwa korupsi merupakan masalah struktural yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang.

Media juga membingkai korupsi sebagai faktor utama yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat mereka terlibat dalam korupsi, mereka cenderung merasa tidak percaya pada sistem politik dan pemerintahan yang ada. Media memperlihatkan ini sebagai isu yang merusak hubungan antara pemerintah dan warga, serta menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif.

Dalam beberapa pemberitaan, media di Kalimantan Selatan mengaitkan korupsi dengan ketidakadilan sosial yang merugikan masyarakat miskin. Framing ini menyoroti ketimpangan yang timbul akibat aliran dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi justru diselewengkan oleh individu atau kelompok yang berkuasa. Dalam konteks ini, media berperan dalam membangkitkan kesadaran kolektif bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah struktural yang mengancam keadilan sosial.



Gambar 4. Media Pojok Banua mengenai korupsi bonus atlet

Pemberitaan media dapat membingkai korupsi sebagai masalah hukum yang harus diselesaikan melalui penegakan hukum yang tegas. Dalam hal ini, pemberitaan lebih berfokus pada proses hukum yang harus dilalui oleh pelaku korupsi dan pentingnya tindakan yang transparan serta akuntabel dari aparat penegak hukum.

Persepsi publik dapat dengan sadar terpengaruh oleh pemberitaan yang diciptakan media tentang efektivitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Jika media menyoroti kasus-kasus yang diproses dengan baik, ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebaliknya, jika penegakan hukum dirasa lemah atau ada indikasi adanya kolusi, media bisa mengkritik dan mempertegas perlunya reformasi dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, media massa memainkan peran penting dalam membingkai isu korupsi, dengan memilih berbagai narasi yang akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Melalui framing, media dapat memperlihatkan korupsi sebagai kejahatan yang merugikan masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan, masalah sistemik, tantangan dalam penegakan hukum, dan isu moral yang mempengaruhi integritas pejabat publik. Dengan demikian, media tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap masalah korupsi dan mempengaruhi tindakan yang diambil oleh publik serta pengambil kebijakan.

Pengaruh Terhadap Persepsi dan Tindakan Publik

Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik dan mempengaruhi tindakan masyarakat terkait isu-isu besar, termasuk kasus korupsi. Dalam konteks Kalimantan Selatan, pemberitaan tentang korupsi yang melibatkan pejabat publik atau instansi pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana masyarakat memandang masalah tersebut dan bagaimana mereka bereaksi terhadapnya. Media tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang dan mendorong tindakan dari publik.

Melalui pemberitaan yang intens dan mendalam mengenai kasus korupsi, kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi semakin meningkat. Informasi yang disajikan oleh media, seperti kerugian negara, hambatan dalam pembangunan, dan

ketidakadilan sosial yang ditimbulkan akibat praktik korupsi, dapat mengubah cara pandang publik terhadap masalah ini.

Sering kali, media membongkar korupsi sebagai produk dari sistem yang cacat dan penuh celah untuk disalahgunakan. Jika pemberitaan menunjukkan bahwa korupsi terjadi secara meluas dan melibatkan banyak pihak dalam struktur pemerintahan atau pemerintahan daerah, masyarakat mungkin mulai merasa bahwa korupsi adalah bagian dari kebiasaan sistemik yang sulit diberantas. Melalui pemberitaan yang menyoroti bagaimana pejabat publik, pengusaha, dan institusi penegak hukum terlibat dalam jaringan korupsi, media dapat memperkuat persepsi bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi juga akibat dari sistem yang rusak. Ini dapat menyebabkan publik merasa bahwa pemberantasan korupsi memerlukan reformasi struktural yang lebih mendalam, bukan sekadar tindakan individu atau kebijakan sementara.

Pemberitaan yang berfokus pada kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi seringkali membentuk sikap kritis dan skeptis masyarakat terhadap pemerintah. Media yang aktif mengungkapkan skandal-skandal korupsi dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap pejabat yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Masyarakat mungkin mulai melihat pejabat publik dengan pandangan negatif, menganggap mereka sebagai koruptor atau pengkhianat yang tidak layak dipercaya. Hal ini memperburuk reputasi pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi, mengurangi kredibilitas mereka di mata publik.



Gambar 5. Media Kompas.Tv mengenai aktivis sindir penanganan korupsi di Kalimantan Selatan

Pemberitaan media yang mengangkat masalah korupsi dapat mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pemberantasan korupsi. Media, baik melalui liputan berita maupun kampanye publik, seringkali mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi atau menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah yang tidak efektif dalam menangani kasus korupsi.

Banyak media yang turut terlibat dalam kampanye kesadaran anti-korupsi, baik melalui program sosial, kolom opini, atau diskusi publik. Kampanye ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan publik, serta menumbuhkan sikap anti-korupsi di kalangan generasi muda.

Media massa memiliki peran penting dalam meningkatkan tekanan sosial terhadap penegak hukum dan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menangani kasus korupsi. Ketika media secara intensif melaporkan kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi atau tokoh publik, publik menjadi lebih terjaga dan mengharapkan proses hukum yang transparan dan cepat. Jika media terus menyoroti kasus-kasus yang belum terungkap tuntas atau masih dalam proses hukum, masyarakat akan menuntut agar penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan. Mereka akan lebih berani untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan lembaga penegak hukum, terutama jika ada indikasi bahwa ada pihak yang dilindungi atau diperlakukan lebih lembut karena status atau kekuasaan mereka.

BERITA UTAMA HUKUM DAN KRIMINAL

LSM KAKI KALSEL Gelar Aksi Di Kejati Kalsel, Soroti Kasus Korupsi Dan Proyek Pembangunan

OKTOBER 3, 2024



Gambar 6. Kakinews.id mengenai LSM Kaki Kalsel Gelar Aksi

Pemberitaan yang terus mengangkat isu korupsi juga dapat mendorong masyarakat untuk menuntut perubahan sistem dalam pemerintahan dan lembaga penegak hukum. Media bisa memperkuat narasi bahwa reformasi hukum dan transparansi pemerintahan adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Secara keseluruhan, media berperan sebagai agen pembentuk persepsi, dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan memperkuat persepsi tentang ketidakadilan sistemik. Di sisi lain, media juga mendorong tindakan publik, baik dalam bentuk partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi, peningkatan tekanan pada aparat penegak hukum, maupun keikutsertaan dalam pemilu dan proses demokrasi yang lebih sadar akan isu-isu korupsi.

Dengan kata lain, media massa tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membentuk sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah, serta memotivasi tindakan yang lebih aktif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa media massa di Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam pemberitaan kasus korupsi, namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh tekanan politik dan keterbatasan investigasi jurnalistik. Pemberitaan yang konsisten dan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga isu korupsi tetap menjadi perhatian publik dan mendorong tindakan nyata dari pemerintah serta penegak hukum. Media massa harus terus memperkuat perannya sebagai pengawas independen, memastikan bahwa pemberitaan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga dapat mendorong perubahan sosial.

Media massa di Kalimantan Selatan juga berperan besar dalam membentuk agenda publik dan cara pandang masyarakat terhadap isu korupsi melalui teori agenda setting dan framing. Media memilih untuk menyoroti isu korupsi, menjadikannya masalah penting yang harus segera ditangani, dan membingkai pemberitaan dengan berbagai narasi yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Secara keseluruhan, media massa tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mempengaruhi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong perubahan sosial di Kalimantan Selatan terkait pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, D., Hakim, F. A., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran media sosial sebagai sarana partisipasi warganet dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4). <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Hikmawati, P. (2018). Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi Hand Arrest Operation In Handling Corruption Case. *Negara Hukum*, 9(1).
- Ibrahim, I. S. (2007). *Budaya populer sebagai komunikasi: dinamika popscape dan mediascape di Indonesia kontemporer*. Jelasutra.
- Latala, M. R. A., Manoppo, B., & Koesoemo, A. T. (2021). Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, X(1), 128–135. Lisis Terhadap Operasi Tangkap Tang. *Lex Crimen*, 10(1).
- Malau, R. M. U. (2023). Komodifikasi Kasus Korupsi; Framing Media Operasi Penangkapan Wali Kota Bandung oleh Kompas. com dan CNN. Indonesia. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 175–181.
- Mccombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2). <https://doi.org/10.1086/267990>
- Nadhiroh, N., Adiba, M. A. M., Wijayanti, T. N. T., Faiz, A. Z., & Wahyuni, R. D. (2024). Pesan-pesan Anti Korupsi dalam Berita Republika. co. id untuk Meningkatkan Peran Media Islam. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(2), 156–177.
- Putra, E. N. (2016). Peran Media Massa Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1789>
- Scheufele, B. (2022). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. In *Schlüsselwerke: Theorien (in) der Kommunikationswissenschaft*. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37354-2_8

- Sovianti, R. (2019). Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 1(1). <https://doi.org/10.31599/komaskam.v1i1.3258>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). CV. Alfabeta.
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Triwidodo, A., Hsb, F. W., Baidawi, A., Zurdi, A. F., Fadilla, R. R., Jannah, R. A. M., & Farma, R. (2024). Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi. *Hikamatzu| Journal of Multidisciplinary*, 1(2), 294–307.
- Wardhana, A. S., & Muhammad, H. Y. (2023). Pengaruh Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Masyarakat (Studi Kasus KPK). *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18(1), 5.
- Wibisono, D. K., Pujiyono, P., & Astuti, A. M. E. S. (2021). Operasi Tangkap Tangan Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 10(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.28166>

Copyright holder:

Seftian Pratama Heru Arnafama, Muhammad Adam Lazuardi, Putri, Ira Lesmia Putri, Muzahid Akbar Hayat (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

